



Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2001-2023

Yan Septian^{1*}, Joko Suharianto²
^{1,2}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: sembiringyan439@gmail.com*

Abstract. *This study analyzes the relationship between the Human Development Index (HDI), regional minimum wage, and labor force participation rate on poverty in North Sumatra from 2001 to 2023. The data used is secondary data in the form of time series obtained from the Central Bureau of Statistics. The analysis method used in this study is multiple regression analysis with the help of E-Views software. The results showed that the Human Development Index (HDI) does not have a significant effect on poverty, suggesting that despite the positive value of HDI, it does not necessarily contribute to reducing poverty in the region. On the other hand, the regional minimum wage has a negative effect on poverty, indicating that an increase in the minimum wage tends to reduce poverty. Similarly, the labor force participation rate also shows a negative and significant effect on poverty, suggesting that higher workforce participation can reduce the poverty rate. The simultaneous analysis indicates that the combination of HDI, regional minimum wage, and labor force participation rate has a significant effect on poverty in North Sumatra. This study highlights the importance of policy interventions related to labor force participation and wage regulations, and suggests that improving these factors could have a more direct impact on poverty alleviation in the region.*

Keywords: *Human development index, Labor force participation rate, Poverty, Regional minimum wage*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum regional, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Sumatera Utara pada periode 2001 hingga 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data deret waktu yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak E-Views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa meskipun nilai IPM positif, hal ini tidak secara langsung mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Di sisi lain, upah minimum regional memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa kenaikan upah minimum cenderung mengurangi kemiskinan. Begitu juga dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menyarankan bahwa partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Analisis simultan menunjukkan bahwa kombinasi antara IPM, upah minimum regional, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Penelitian ini menyoroti pentingnya intervensi kebijakan terkait partisipasi angkatan kerja dan regulasi upah, serta menyarankan bahwa perbaikan faktor-faktor tersebut dapat memiliki dampak langsung dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, Kemiskinan, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Upah minimum regional

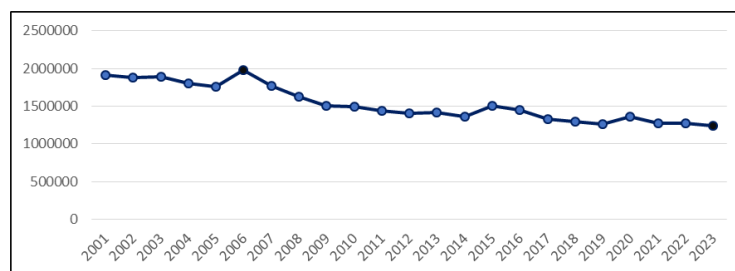
1. LATAR BELAKANG

Pada hakikatnya setiap negara memiliki tujuan, seperti halnya tujuan Indonesia yang telah tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut akan tercapai apabila pemerintah mampu

menangani berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah dasar dalam pembangunan.

Kemiskinan di Indonesia sebagai negara berkembang menjadi salah satu masalah terbesar bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang juga merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia yang memiliki masalah kemiskinan. Meskipun setiap tahun rasio penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan, namun jumlah penduduk miskin masih sangat tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai.

Berikut merupakan grafik kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2001 hingga 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (2024)

Gambar 1. Grafik Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara

Bappeda (2021) mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu daerah juga dapat menjadi indikator tingkat kesejahteraan masyarakat di negara/daerah tersebut. Artinya, apabila tingkat kemiskinan di suatu daerah tinggi, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih sangat rendah. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam upaya penanggulangan kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Hal ini juga sesuai dengan fakta yang telah dianalisa di atas dalam bentuk grafik pada gambar 1. Terlihat bahwa angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan jumlah 1.979.702 jiwa dan terus menurun hingga tahun 2013 dengan jumlah 1.416.400 jiwa. Pada tahun berikutnya angka kemiskinan kembali meningkat, meskipun pada tahun 2013 sempat turun, angka kemiskinan minimum di Sumatera Utara berada pada tahun 2023 dengan jumlah 1.239.710 jiwa.

Salah satu teori kemiskinan dalam hal indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat partisipasi tenaga kerja adalah “Teori Kemiskinan Struktural”. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kegagalan individu, tetapi juga merupakan akibat sampingan dari penyebab struktural dan sistemik masyarakat. Indeks pembangunan manusia yang rendah menunjukkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak sehingga mengurangi kemampuan

mereka untuk meningkatkan taraf hidup (Suryawati, 2004). Selain itu, upah minimum yang rendah berarti pasar tenaga kerja tidak membayar cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan adanya hambatan struktural terhadap penyerapan tenaga kerja, yang mungkin diakibatkan oleh kekurangan lapangan pekerjaan atau kurangnya keterampilan yang tepat. Secara umum, teori stres dan ketegangan membenarkan bahwa untuk memberantas kemiskinan, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dengan baik dan menyeluruh, yaitu meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan, menyesuaikan upah minimum pada skala biaya hidup, dan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Teori ini menekankan perlunya peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai prioritas utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada tingkat yang berkelanjutan.

Jika kita melihat Indeks Pembangunan Manusia, angka kemiskinan, dan kondisi TPAK masing-masing daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk miskin yang besar, maka akan rendah Indeks Pembangunan Manusia. Begitu pula daerah dengan Upah Minimum yang rendah, rata-rata memiliki jumlah penduduk miskin yang besar. Begitu pula daerah dengan TPAK yang rendah, rata-rata memiliki jumlah penduduk miskin yang besar. Dari paparan permasalahan yang telah dijelaskan, agar mengetahui apakah IPM dan Upah Minimum penting dalam mengatasi permasalahan yang ada, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara Tahun 2001-2023”.

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah umum yang dihadapi oleh semua negara. Tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terganggu oleh kemiskinan merupakan petunjuk penting bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan terjadi ketika kemakmuran suatu negara tidak terdistribusi secara merata kepada warga negaranya. Ada warga negara yang memiliki banyak aset, tetapi yang lain hidup dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan salah satu masalah utama pembangunan ekonomi di suatu negara yang mana pembangunan ekonomi pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan semua ciri pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan dan peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Kemiskinan merupakan kondisi ekonomi ketika individu atau masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya dalam hal pengeluaran. Kemiskinan (standar hidup rendah) merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Di Indonesia, masih banyak sekali masyarakat miskin yang masih kesulitan memenuhi kebutuhannya dan terjebak dalam kemiskinan.

Secara umum menurut Suryawati (2004) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu keadaan ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam beberapa standar harga tergolong rendah, artinya tidak mampu memenuhi tingkat kualitas hidup secara umum. Berdasarkan pengertian tersebut, kemiskinan pada umumnya diartikan sebagai suatu kondisi tidak adanya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya tingkat kualitas hidup.

Menurut Jonathan Haughton (2009), kemiskinan selalu dikaitkan dengan ketimpangan dan kerentanan, karena orang menghadapi masalah seperti krisis keuangan dan orang yang tidak miskin sewaktu-waktu bisa menjadi miskin jika terjadi penurunan harga usaha pertanian. Kerentanan ialah aspek kunci dari kesejahteraan karena mempengaruhi perilaku setiap orang dalam hal investasi, pola produksi dan strategi terkait serta persepsi tentang keadaan mereka sendiri.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan tentang bagaimana manusia sebagai warga negara dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Secara spesifik, IPM menghitung capaian pembangunan manusia berdasarkan jumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang mampu mencerminkan keempat dimensi, yaitu usia harapan hidup mencerminkan sektor kesehatan, angka melek huruf dan lama sekolah mencerminkan capaian pembangunan di sektor pendidikan, dan daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar yang terlihat melalui rata-rata tingkat pengeluaran per kapita sebagai ukuran pendapatan yang mencerminkan capaian pembangunan untuk hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan satuan ukur untuk menghitung keberhasilan pembangunan suatu wilayah. IPM merupakan angka yang dihitung berdasarkan tiga indikator, yaitu umur panjang, pengetahuan, dan taraf hidup suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

IPM yang rendah menunjukkan kegagalan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2008 merupakan indeks yang bersifat indikator dan dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara representatif dan terukur. IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga dimensi yang fundamental bagi manusia dan secara operasional mudah diperkirakan untuk mengembangkan suatu ukuran yang mencerminkan upaya pembangunan manusia. Dimensi ketiga terdiri dari harapan hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*standard of living*). Harapan hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata jumlah tahun sekolah dan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas, dan kehidupan yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita berdasarkan paritas daya beli. Proses pembangunan sumber daya manusia merupakan proses yang panjang yang memerlukan interaksi dari semua sektor yang akan terjadi tahap demi tahap (UNDP 2008).

Upah Minimum Regional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dengan tunjangan tetap. Upah minimum diperuntukkan bagi pekerja yang belum menikah dengan masa kerja 0-1 tahun, bersifat sebagai jaring pengaman, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Dewan Pengupahan, dan memiliki masa berlaku 1 tahun.

Pembayaran upah kepada pekerja yang telah terlibat dalam suatu kegiatan produksi pada hakikatnya merupakan balas jasa dari produsen kepada pekerja atas prestasi yang telah dicapainya dalam kegiatan produksi. Kebijakan pengupahan di Indonesia menentukan taraf hidup pekerja. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum dihitung berdasarkan standar kebutuhan hidup layak (KHL).

Menurut Marinda et al. (2017) Tujuan awal penetapan upah minimum adalah untuk mencapai standar hidup minimum seperti kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum merupakan salah satu cara untuk mengangkat status orang miskin. Upah minimum memengaruhi kemiskinan. Semakin rendah upah minimum di masyarakat, semakin tinggi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa upah minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang bertujuan mengangkat derajat penduduk berpendapat rendah.

Dari definisi-definisi di atas, meskipun maknanya berbeda-beda, namun jelas memiliki maksud yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa upah dapat diartikan sebagai pengganti atas jasa yang telah diberikan oleh karyawan kepada suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam memberikan upah, perusahaan perlu mempertimbangkan norma-norma kewajaran dan kepatutan. Yang dimaksud dengan adil adalah besarnya upah yang diberikan harus sesuai dengan nilai relatif dari pekerjaan. Artinya, pekerjaan yang sama harus dibayar dengan jumlah yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan tepat adalah besarnya upah yang diberikan kepada karyawan harus sama dengan kompensasi yang diterima oleh karyawan sejenis di perusahaan lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang bekerja, baik itu di perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintahan. Menurut Sukirno (2004) angkatan kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah pekerja atau tenaga kerja yang ada dalam ruang lingkup perekonomian dalam kurun waktu tertentu yang digolongkan menjadi kelompok yang sedang bekerja dan kelompok yang sedang menganggur namun sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja biasanya dapat dijelaskan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK sendiri membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yaitu 15-64 tahun yang dianggap mampu menghasilkan barang dan jasa.

Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat, yang mana nantinya menjadi modal bagi bergeraknya roda perekonomian negara.

Menurut Simanjuntak (2005) dalam Alfandi (2024), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang menjelaskan atau menunjukkan keaktifan setiap penduduk yang ada di Indonesia dalam setiap kegiatan yang dilakukan setiap harinya pada periode waktu dalam survei, maka dari itu jika semakin kecil jumlah penduduk yang bukan golongan angkatan kerja, maka semakin kecil pula angkatan kerja yang nantinya ini akan berdampak kepada semakin kecilnya juga tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa TPAK merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya output suatu kegiatan ekonomi, sehingga semakin produktif masyarakat maka output

yang dihasilkan akan semakin tinggi pula kontribusinya terhadap PDB. Begitu pula dengan pendapatan per kapita. Meningkatnya TPAK suatu daerah berarti meningkatnya pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi yang menentukan pertumbuhan ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah kuantitatif, dengan menjelaskan pengaruh antara variabel antara kemiskinan sebagai variabel terikat dengan variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum regional dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dipublikasikan oleh sebuah Lembaga. Adapun data yang digunakan berupa data time series dengan jangka waktu dari tahun 2003 – 2023 yaitu sebanyak 20 tahun dari negara Indonesia. Adapun data bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistika (BPS). Data di regresi menggunakan e-views. Dengan persamaan model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$K = \beta + \beta_1 IPM + \beta_2 UMP + \beta_3 TPAK + \varepsilon$$

Keterangan :

K : Kemiskinan

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

UMP : Upah Minimum Regional

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

β : Konstanta

ε : *Error Term*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan langkah penting dalam analisis regresi linier berganda menggunakan metode ordinary least square (OLS). Metode OLS diterapkan ketika terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Menurut Ghozali (2018), untuk mengevaluasi keakuratan model regresi, perlu dilakukan pengujian terhadap beberapa asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Proses pengujian ini sangat krusial untuk memastikan validitas hasil analisis regresi linier berganda berbasis OLS.

Menurut Ghozali (2018), uji normalitas adalah pengujian untuk mengetahui apakah residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi berdistribusi normal. Asumsi normalitas ini penting karena metode ordinary least square (OLS) mengasumsikan bahwa residual

terdistribusi normal, terutama untuk sampel yang kecil. Selanjutnya, uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinieritas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil dan menyulitkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen.

Dalam uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah variance residual bersifat konstan (homoskedastisitas) atau tidak (heteroskedastisitas). Heteroskedastisitas dapat mengakibatkan estimasi standar error yang bias, sehingga mengganggu keakuratan pengujian hipotesis. Terakhir, uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada observasi yang berbeda, khususnya dalam data time series. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak efisien dan memengaruhi validitas pengujian statistik. Keempat uji ini merupakan langkah penting dalam memastikan model regresi linier memenuhi asumsi klasik dan menghasilkan estimasi yang valid.

Berikut merupakan hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Kriteria	Nilai Hasil	Keterangan
Normalitas	prob Jarque bera < 0,05	0,6361	tidak terjadi pelanggaran uji normalitas data.
Multikolinieritas	VIF < 10	1.087756 ; 1.132850 ; 1.043650	tidak terjadi pelanggaran uji multikolinearity data
Heteroskedastisitas	prob chi square > 0,05	0,0744	tidak terjadi pelanggaran uji heteroskedastisitas data.
Autokorelasi	prob chi square > 0,05	0,2705	tidak terdapat pelanggaran uji autokorelasi data

Sumber: Data diolah (2025)

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur sejauh mana dan bagaimana arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh gabungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat, serta memungkinkan prediksi nilai variabel terikat ketika semua nilai variabel bebas telah diketahui. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1993385.0	1087644.0	1.832755	0.0844
IPM	26050.81	9621.549	2.707549	0.0149
UMR	-0.263049	0.030407	-8.650948	0.0000
TPAK	-28366.51	12089.01	-2.346471	0.0313
F-sattistic	30.8363	R-squared		0.8447
Prob.	0.0000	Adj. R-squared		0.8173

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis linear berganda didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$K = 1993384.9 + 26050.8IPM - 0.263048UMR - 28366.5TPAK + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 1993384,9. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dianggap konstan, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara akan mencapai 1.993.384%. Selain itu, koefisien regresi untuk variabel IPM sebesar 26.050,81 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1% pada IPM, tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 26.050,81%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sementara itu, koefisien regresi untuk UMR sebesar -0,263048 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% pada UMR, tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0,263048%, asalkan variabel lain tidak berubah.

Di sisi lain, koefisien regresi untuk TPAK sebesar -28.366,50 menyiratkan bahwa setiap kenaikan 1% pada TPAK, tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 28.366,50%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan UMR dan TPAK memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan, sedangkan peningkatan IPM justru berkontribusi pada kenaikan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, meskipun arah dan besaran pengaruhnya berbeda-beda.

Uji Hipotesis Parsial

Uji parsial, atau yang dikenal juga dengan uji t (t-test), adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Uji ini membantu menentukan apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai t-hitung sebesar 2.707549 > t-table 1,74588 dengan prob. 0.0149 < 0.05, maka Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel Upah Minimum Regional memiliki nilai t-hitung sebesar 8.650948 > t-tabel 1,74588 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 < 0.05, maka Upah Minimum Regional berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki nilai t-hitung sebesar 2.346471 > t-tabel 1,74588 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0313 < 0.05, maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Uji Hipotesis Silmutan

Uji Silmutan atau uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang ditetapkan, biasanya sebesar 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh signifikan secara bersama-sama. Nilai f-hitung padapenelitian ini sebesar $30.83637 > t\text{-tabel } 3,24$ dengan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0.05$, maka secara simultan Indeks Pembangunan Manusia, upah minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan pengujian, ditemukan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menolak teori pendukung sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Praja, Muchtar, and Sihombing (2023) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Permana and Pasaribu (2023) yang menyimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap kemiskinan.

Berdasarkan hasil di lapangan terbukti indeks pembangunan manusia yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dapat disebabkan oleh Fenomena ini sering terjadi di daerah dengan struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor informal atau pertanian, seperti di beberapa wilayah di Sumatera Utara. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan angka harapan hidup dan jumlah populasi usia produktif, yang jika tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan yang memadai, dapat menyebabkan tekanan ekonomi lebih lanjut dan meningkatkan angka kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Upah Minimum Regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menolak Penelitian yang dilakukan Abdul Aziz and Abdul Husenudin (2024) yang menyatakan bahwa upah minimum regional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap reduksi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2019-2023 disisi lain, adanya pengaruh negatif yang signifikan antara indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama periode tersebut.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Syuhada (2019) yang menyimpulkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ashari, Rafi Taufik, and Mohammad Athoillah (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil di lapangan terbukti upah minimum regional yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara disebabkan apabila kenaikannya mampu meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu faktor utama adalah peningkatan pendapatan pekerja berpenghasilan rendah, yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mengurangi angka kemiskinan. Namun tidak selalu faktor-faktor tersebut mempengaruhi kemiskinan karena ketika UMR meningkat gaya hidup seseorang juga akan terpengaruh sehingga ia tetap termasuk kedalam golongan penduduk miskin.

Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

TPAK dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini menolak penelitian dari Penelitian yang dilakukan oleh Delviera et al. (2024) berdasarkan hasil temuan, menemukan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dan penelitian yang dilakukan Nengsih, Andriani, and Sugiharto (2017) secara parsial Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ashari and Athoillah (2023) Koefisien regresi variabel TPAK atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang

bernilai negatif sebesar 10.64259 menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan pada variabel Upah Minimum sebesar 1 satuan maka nilai variabel Kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 10.64259 ribu jiwa. Dan hasil penelitian Christy et al. (2024) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

Jumlah penduduk yang bukan usia kerja semakin bertambah ini menyebabkan jumlah angkatan kerja dan TPAK menurun. Jika TPAK menurun maka pendapatan perkapita juga turun dikarenakan semakin sedikit masyarakat yang produktif. Apabila hal ini terus bertambah, maka akan semakin banyak pengangguran dan presentase kemiskinan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan “Teori Kapital Manusia” menjelaskan bahwa orang yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang lebih baik biasanya lebih produktif dan lebih mungkin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik. Jika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun, misalnya karena pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan, atau sedikitnya kesempatan kerja, maka semakin banyak orang yang tidak bekerja. Hal ini menyebabkan pendapatan keluarga berkurang dan kemiskinan meningkat. Dengan kata lain, semakin sedikit orang yang bekerja, semakin besar risiko kemiskinan karena mereka tidak memiliki penghasilan tetap.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara

Penelitian ini menemukan bahwa IPM, UMP, dan TPAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan secara simultan. Hal ini didukung dengan nilai adjusted R-Square sebesar 0.817367 maka, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan kontribusi sebesar 81.73% terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, sisanya 18.27% dipengaruhi oleh variabel lain diluar dalam penelitian ini.

Salah satu teori kemiskinan dalam hal indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan tingkat partisipasi tenaga kerja adalah “Teori Kemiskinan Struktural”. Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kegagalan individu, tetapi juga merupakan akibat sampingan dari penyebab struktural dan sistemik masyarakat (Todaro et al. 2020). Indeks pembangunan manusia yang rendah menunjukkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup yang layak sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup. Selain itu, upah minimum yang rendah berarti pasar tenaga kerja tidak membayar cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang pada

akhirnya menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan adanya hambatan struktural terhadap penyerapan tenaga kerja, yang mungkin diakibatkan oleh kekurangan lapangan pekerjaan atau kurangnya keterampilan yang tepat. Secara umum, teori stres dan ketegangan membenarkan bahwa untuk memberantas kemiskinan, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dengan baik dan menyeluruh, yaitu meningkatkan standar kesehatan dan pendidikan, menyesuaikan upah minimum pada skala biaya hidup, dan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja dengan baik. Teori ini menekankan perlunya peningkatan infrastruktur sosial dan ekonomi sebagai prioritas utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan pada tingkat yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kemiskinan di Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa IPM memiliki pengaruh positif dalam mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upah Minimum juga berperan penting dalam menurunkan angka kemiskinan dengan memberikan penghasilan yang lebih baik bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang tinggi dapat membuka peluang kerja, akses yang tidak merata menunjukkan bahwa faktor ini tidak selalu menjamin penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan kebijakan terkait IPM, upah, dan partisipasi tenaga kerja untuk menangani kemiskinan secara efektif.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah daerah disarankan merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, berfokus pada peningkatan IPM melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, implementasi program pelatihan dan pengembangan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kemiskinan di Sumatera Utara dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz, and Abdul Husenudin. 2024. “Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Barat 2019-2023.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(6). doi: 10.47467/alkharaj.v6i6.1771.
- Alfandi, Muhammad. 2024. “Pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Bagian Barat Skripsi.”
- Ashari, Rafi Taufik, and Mohammad Athoillah. 2023. “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kawasan Tapal Kuda.” *Journal of Development Economic and Social Studies* 2(2):313–26. doi: 10.21776/jdess.2023.02.2.08.
- Bappeda. 2021. “Laporan Pengukuran Kemiskinan Aceh Tahun 2021” Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- BPS. 2014. “Indeks Pembangunan Manusia 2014.” 6.
- BPS. 2018. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Tahun 2018.” (61):1–9.
- BPS. 2021. “Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.
- Christy, Nethania, La Ode Ahmad Arafat, Kiky Asmara, and Arief Bachtiar. 2024. “Analisis Pengaruh Antara Pendidikan, Kesehatan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.” 10(19):1–23.
- Dakhilullah, Muhammad F. 2022. “Pengaruh Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Pulau Jawa Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.” *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 1(1):60–75. doi: 10.58192/wawasan.v1i1.239.
- Delviera, Adela, Syamsul Amar. 2024. “Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.” *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*. 1(4): 799-806.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: Bandan Penerbit Undip.
- Jonathan Houghton, Shahidur R. Khandker. 2009. *Handbook on Poverty and Inequality*.
- Marinda, Anna, Nasikh, Imam Mukhlis, Mit Witjaksono, Sugeng Hadi Utomo, Handoko, Hari Wahyono, Yohanes Hadi Soesilo, Moeheriono, and Setyobudi Santoso. 2017. “The Analysis of the Economic Growth, Minimum Wage, and Unemployment Rate to the Poverty Level in East Java.” *International Journal of Economic Research* 14(13):127–38.

- Nengsih, Titin Agustin, Beid Fitrianova Andriani, and Joko Sugiharto. 2017. "Pengaruh PDRB, TPAK, IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Zakat Sebagai Variabel Moderasi Di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022." *Arzusin* 4(1):264–90. doi: 10.58578/arzusin.v4i1.2647.
- Ningsi, Melya Nurtiwi. 2023. "Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Dan Upah Minimum Regional (Umr) Terhadap Pengangguran Di Provinsi Aceh." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Viii(I):1–19.
- Pemerintah Pusat. 2003. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA." Pp. 1–7 in.
- Permana, Handika, and Esti Pasaribu. 2023. "Pengaruh Inflasi, Ipm, Ump Dan Pdrb Terhadap Kemiskinan Di Pulau Sumatera." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7(3):1113–32. doi: 10.31955/mea.v7i3.3516.
- Praja, Rama Bhaskara, Masruri Muchtar, and Pardomuan Robinson Sihombing. 2023. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta." *Ecoplan* 6(1):78–86. doi: 10.20527/ecoplan.v6i2.656.
- Prayoga, Margaretha Larasati, Muchtolifah Muchtolifah, and Sishadiyati Sishadiyati. 2021. "Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo." *Jambura Economic Education Journal* 3(2):135–42. doi: 10.37479/jeej.v3i2.11058.
- Purnomo, Eddy Sutadji, Wargijono Utomo, Okta Purnawirawan, Rachmat Farich, Sulistianingsih A.S., Ratna Fajarwati M., Annisa Carina, and Najih Gilang R. 2022. *Analisis Data Multivariat*.
- Ristika, Ema Dian, Wiwin Priana Primandhana, and Mohammad Wahed. 2021. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur." *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12(2):129. doi: 10.33087/eksis.v12i2.254.
- Rohmah, Ida Syafa'atur, and Jalu Aji Prakoso. 2022. "Pengaruh Ipm, Rls, Tpt, Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat." *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan* 2(6):255–66. doi: 10.55047/transekonomika.v2i6.294.
- Silalahi, Masna Sophia, and Sandhy Walsh. 2023. "Analyzing Government Policies in Addressing Unemployment and Empowering Workers: Implications for Economic Stability and Social Welfare." *Law and Economics* 17(2):92–110. doi: 10.35335/laweco.v17i2.3.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan 1. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2019. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN 1987.

Syuhada, Muhammad Isan. 2019. “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pdrb Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa.” *Sustainability (Switzerland)* 11(1):1–14.

Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2020. *Economic Development. Thirteenth Edition*. Harlow: Essex Pearson Education Limited.

UNDP. 2008. “Annual Report 2008.” *Annual Report*.